

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan sikap partai politik Gerindra yang merubah sikapnya dari partai oposisi menjadi partai koalisi pasca pemilu 2019, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perubahan sikap yang dilakukan oleh partai Gerindra dengan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan bisa berdasarkan faktor pragmatis. Partai Gerindra memilih jalan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan memaksimalkan kepentingan yang dimiliki untuk mencapai tujuannya dengan cara yang dianggap rasional.
2. Prabowo melihat adanya peluang untuk memperoleh banyak keuntungan dengan bergabung kedalam koalisi pemerintahan, partai juga melihat bahwa dapat terpenuhinya kebutuhan pendanaan yang akan diperoleh melalui kader yang mendapatkan kedudukan dalam kementerian. Partai Gerindra memiliki akses dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan dipilihnya Prabowo sebagai penanggung jawab pengelolaan *food estate*, sehingga menurut James B. Rule terkait dengan keputusan terutama dalam hal perubahan sikap yang dilakukan partai Gerindra dengan masuknya ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya yaitu adanya aktor yang memiliki pengaruh dalam merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional tentang tindakan mana yang memaksimalkan keuntungan mereka.
3. Adanya perubahan sikap Partai Gerindra setelah bergabung ke dalam koalisi Jokowi yaitu perubahan sikap terhadap kenaikan harga BBM dimana saat menjadi oposisi partai Gerindra menolak gagasan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, namun setelah bergabung ke dalam koalisi hal tersebut tidak menjadi masalah.
4. Masuknya Gerindra ke dalam koalisi berdampak kepada koalisi yang semakin besar yang secara langsung melemahkan posisi oposisi sehingga prinsip *check and balances* sulit diimplementasikan. Hal ini tentu akan membuat ketidak seimbangan dalam distribusi kekuasaan pemerintahan dan penurunan kualitas demokrasi Indonesia.

Eva Faturjannah, 2023

ANALISIS PERUBAHAN SIKAP PARTAI POLITIK GERINDRA DARI PARTAI OPOSISI MENJADI PARTAI KOALISI PASCA MASA PEMILU 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Pemerintah Indonesia perlu mengimplementasikan sebuah kebijakan yang dapat meminimalisir adanya praktek bergabungnya partai politik setelah kalah dalam pemilu, dimana hal ini dapat menyebabkan hilangnya demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Tidak hanya itu saja pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan finansial untuk partai politik, dan pemerintah juga perlu konsisten dalam penegakan hukum, membangun oposisi dengan memberikan ruang yang pantas untuk bersuara, untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

5.2.2 Saran Teoritis

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai analisis masuknya partai politik dari partai oposisi ke dalam partai koalisi setelah berakhirnya masa pemilihan umum dengan meneliti partai politik yang lain dimana fenomena tersebut tidak hanya dilakukan oleh partai Gerindra saja. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan melihat fenomena pindahnya partai oposisi dalam koalisi secara mendadak dengan melihat dampaknya untuk sistem demokrasi.